

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermassa, Jakarta
- Arie S. Hutagalung, 2002, *Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi, Suatu Kumpulan Karangan. Cetakan Kedua*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Sutardja Sudrajat, 1997, *Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertifikatnya*, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 2000, *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Edy Putra Tje'aman, 1986, "Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis", Liberty, Yogyakarta.
- Eddy Ruchiyat, 1994, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Arnico, Bandung.
- E. Suherman, 1979, *Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Termatik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Aditama Refika, Bandung.

- Habib Adjie, 2014, *Menjalिन Pemikiran Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Habib Adjie, 2017, *Sanksi Perdata & Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- H.P. Panggabean, 2012, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Kencana, Jakarta.
- JJ. H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum* (alih bahasa oleh Arief Sidharta), Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2006, “Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lanny Kusumawati, 2006, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- Marhais Abdul Hay, 1975, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Bandung.
- Munawar, 2002, *Hak Tanggung*, Grafindo, Surabaya.
- M. Bahsan, 2002, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Edisi 1 Cetakan 8, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung.
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Setiawan, 1987, “Pokok-pokok Hukum Perikatan”, Bina Cipta, Bandung.
- R. Soeroso, 2010, “Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta.

- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta.
- Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sidharta, 2006, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Sri Soesilowati, 2005, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, cet.1, CV Gitama Jaya, Jakarta.
- Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Subekti, 1982, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sutardja Sudrajat, 1997, *Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertifikatnya*, Mandar Maju, Bandung.
- Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse Akta dalam Pembukti dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

Filosofi Perkreditan Bank Mandiri, Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Edisi III, Tahun 2018.

Iga Gangga Santi Dewi, Mira Novana, “Kebijakan Penjaminan Tanah melalui Hak Tanggungan di Indonesia”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3, No. 1, Mei 2020

International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, “Doing Business 2020, Comparing Business Regulation in 190 Economies”, *The Doing Business 2020 Study*, 2020.

Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.2, No. 1, Januari 2018

Priyo Handoko, 2006, *Menakar Jaminan atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember

Purna Noor Aditama, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak pada Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual beli”, *Lex Renaissance*, Vol.3, No. 1, Januari 2018

Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

St. Nurjannah, “Eksistensi Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Hak atas Tanah (Tinjauan Filosofis)”, *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018

Standar Prosedur Kredit Small Medium Enterprise PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Edisi 2 Revisi ke 3, Desember 2020.

PT Bank UOB Indonesia, *Laporan Tahunan 2019*, Jakarta, April 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 349

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893

Lampiran Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tanggal 27 April 2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Hasil Penelitian

Andi Mamminanga, 2008, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Diana Veigule, 2011, *The Mortgage's Rughts to Enforce The Mortgage Execution*, Lund University Press, Sweden.

Fauzi Waskhito, "Analisis Yuridis terhadap Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 ditinjau dari Hukum Jaminan", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019.

Hendra Febri, “Kedudukan *Hukum Kreditur (Bank) selaku Pemegang Hak Tanggungan dalam Implementasi Peraturan Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 di PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk*”, Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Universitas Gadjah Mada, 2020.

Innaka Dewi Hindra, 2019, *Penerapan Asas Praduga Sah terhadap Akta Notaris dengan Adanya Figur Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 43/PDT/2017/PT.BNA)*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Masnah Sari, “Kewajiban PPAT untuk Merahasiakan Isi Akta-akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar yang diberikan Undang-Undang Guna Melindungi Kepentingan Masyarakat Umum”, *Makalah*, Pembekalan PPAT, Depok, 07 September 2002.

Sarehwiyo, “Hak dan Kewajiban PPAT sebagai Pihak dalam Perkara Pidana dan Perdata, berkaitan dengan Rahasia Jabatan dan Sifat Aktanya”, *Makalah*, Rapat Kerja Notaris & PPAT Kota Depok, Depok, 07 September 2002.

Internet

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, “*Profil Perusahaan*”, <https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan>, diakses pada 26 Januari 2021.

PT Bank UOB Indonesia, “*About Us*”, <https://www.uob.co.id/rightbyyou/about/> diakses pada 26 Januari 2021.

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara pada Responden PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Ibu Darna selaku Credit Operation Manager Area Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 13 November 2020

Hasil Wawancara pada responden Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang diwakili oleh Bpk. Priyantono Jati, SE selaku Kepala Subseksi Pendaftaran Tanah, Sleman, tanggal 16 Desember 2020

Hasil Wawancara pada Responden PPAT Kabupaten Sleman, yaitu PPAT Anita Kurniawati, SH, Sleman, tanggal 13 Januari 2021

Hasil Wawancara pada Narasumber PPAT Kota Yogyakarta, yaitu PPAT Mustofa, Yogyakarta, tanggal 19 Januari 2021

Hasil Wawancara pada Narasumber PPAT Kota Yogyakarta, yaitu PPAT Bong Hendri Susanto, Yogyakarta, tanggal 19 Januari 2021

Hasil Wawancara pada Responden PPAT Kabupaten Sleman, yaitu PPAT Winahyu Erwiningsih, Sleman, tanggal 20 Januari 2021

Hasil Wawancara pada Responden PT Bank UOB Indonesia, yang diwakili oleh Ibu Dewi Sulistyawati selaku Document Processing Officer Bank UOB Kantor Wilayah Semarang, Yogyakarta, tanggal 05 Februari 2021

Hasil Wawancara pada Narasumber Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum, Yogyakarta, pada tanggal 18 Februari 2021